

INTISARI

Penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi sebagai penyelenggara Legalisasi, yaitu melaksanakan kegiatan registrasi dan penilaian angka kredit, akreditasi, perijinan fasilitas pelayanan kesehatan, tempat umum dan industri serta pengawasan dan pengaturan di bidang kesehatan. Melalui Seksi Akreditasi Tempat Umum dan Industri diselenggarakan pelayanan publik di bidang perijinan dan akreditasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pelayanan Akreditasi Tempat Umum dan Industri Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan peringkasan atau reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kesehatan dengan studi kasus Akreditasi Tempat Umum dan Industri Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata belum berjalan dengan optimal yang dilihat dari indikator responsivitas, efektivitas dan akuntabilitas.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya kinerja Dinas Kesehatan dengan studi kasus Akreditasi Tempat Umum dan Industri dalam penelitian ini adalah struktur organisasi, sumber daya manusia dan budaya organisasi.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi, maka perlu dilakukan beberapa langkah, yaitu : *pertama*, mengkaji lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus suatu perijinan dengan menyederhanakan sistem dan prosedur yang ada; *kedua*, mengkaji kembali kewenangan yang dimiliki sesuai dengan struktur organisasi yang dipakai; *ketiga*, menerapkan Standar Pelayanan Minimal sebagai upaya untuk melakukan kegiatan pelayanan publik yang lebih profesional; *keempat*, mengirimkan petugas untuk menempuh jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi; *kelima*, meningkatkan sumber daya material serta sarana dan prasarana bagi kelancaran kegiatan pelayanan publik yang dijalankan.

Kata-kata kunci : **kinerja, responsivitas, efektivitas dan akuntabilitas**

ABSTRACT

The development of the health sector is an integral part of the National Development programs aimed to improve every person's awareness, willingness, and capabilities to live a healthy life in order to achieve an optimum level of a society's health degree. According to the Regional Government Regulation no. 11/2000, the Public Health Office of Kulon Progo Regency functions as a legalization body, carrying activities such as registering and assessing the credit point, accreditation, and legal permission for the industrial, public places, and health service facilities, as well as supervising and regulating activities in the health sector. The public services in the legal permission and accreditation sectors are handled by the Industrial and Public Places Accreditation Section.

The research is intended to observe the performance of the Industrial and Public Places Accreditation Services in the Public Health Office of Kulon Progo Regency, Daerah Istimewa Yogyakarta Province. The method used in this research is qualitative descriptive analysis, done by summarizing or reducing data, serving data, and drawing conclusion. The technique of collecting data is carried through observations, interviews, and documentations.

According to the result of the research, it is concluded that the performance of the Public Health Office with the case study of the Industrial and Public Places Accreditation in the Public Health Office of Kulon Progo Regency, Daerah Istimewa Yogyakarta Province, has not yet achieved its optimum level, observed by its responsiveness, effectiveness, and accountability indicators.

The factors affecting the less-than-optimum level of performance of the Public Health Office with the case study of Industrial and Public Places Accreditation in this research are connected to its structure of organization, human resources, and organizational culture.

In order to enhance the organizational performance, some steps are to be taken. *First*, is to assess the time needed to obtain a legal permission by simplifying the existing system and procedures; *second*, is to reassess the existing authorities in compliance with the existing organizational structure; *third*, is to apply the Minimum Service Standard as an attempt to serve the public more professionally; *fourth*, is to send its officers to higher formal educational levels; *fifth*, is to improve the material resources and all the means required to carry out the public service activities more smoothly.

Keywords : performance, responsiveness, effectiveness and accountability.